



**RENCANA KERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019-2023, yang merupakan pedoman utama perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung.

Dengan dibagi-baginya tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu yang lebih pendek, yaitu tahunan, diharapkan rencana kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman penganggaran maupun pelaksanaan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung ini disampaikan terima kasih.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

DAFTAR ISI

BAB I.....	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	39
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	40
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	43
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	43
BAB III	50
<u>4.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional</u>	50
<u>4.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD</u>	53
<u>4.3. Program dan Kegiatan</u>	54
<u>BAB IV</u>	63

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 79 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam periode Tahun 2020. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat ;

- a. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi, dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
- c. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah tercapai.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023;
- l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
- n. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 35);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun tujuan yang

hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 ini diantaranya adalah:

- a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar program antar bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar kegiatan di masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.
- d. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan hubungan dengan dokumen perencanaan lain serta sistematika laporan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, program dan kegiatan menguraikan mengenai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Tahun 2019

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mulai melaksanakan berlaku pada tahun 2017. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun terus dilakukan seiring dilakukannya revisi terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan. Gambaran mengenai evaluasi capaian rencana strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. KLUNGKUNG

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	-	71	73	75	76	78	62,72		71,00	73,00	Terdapat perbaikan implementasi SAKIP diantaranya, perbaikan perencanaan tingkat Kabupaten maupun SKPD, pengukuran kinerja, pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan evaluasi SAKIP SKPD. Indikator ini merupakan indikator Tujuan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung
2.	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra	-	-	90	90	90	90	100	n/a	103,00	90	90	Jumlah Capaian Seluruh Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra dibagi jumlah sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klungkung.
	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	-	-	90	90	90	90	100	n/a	96,12	90	90	Jumlah Capaian Seluruh Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan dibagi jumlah sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klungkung.
	Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	-	-	86	87	88	89	90	n/a	81,67	86	87	Jumlah seluruh nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh Inspektur Kab. Klungkung dibagi jumlah perangkat daerah yang dievaluasi.
	Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional	-	-	1	1	1	1	1	-	2	1	1	Jumlah aksi pelayanan public yang masuk TOP 99 dalam anugerah inovasi pelayanan public yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia

Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung tidak dapat diwujudkan tanpa dukungan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sembilan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ditampilkan pada Lampiran 1.

LAMPIRAN I

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA

No.	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d. Renja SKPD Tahun Lalu ()		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2019		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2019)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
	2	3	4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang																			
	4	1			Administrasi Pemerintahan																			
	4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan (RENSTRA)	Indeks Reformasi Birokrasi Peringkat Daerah	18,00 Jumlah	271.979.464,00	0,00 Jumlah	0	0,00 Jumlah	271.979.464,00	0,00 Jumlah	71.040.686,00	0,00 Jumlah	71.040.686,00	24,9	26,12	0	71.040.686,00	0	26,12	Bagian Kesra	
						Persentase rata-rata capaian output kegiatan	0,00%		0,00%		100,00%		24,90%		24,90%		24,9							
	4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana apaaratur	100,00%	215.991.564,00	0,00%	0	100,00%	215.991.564,00	24,61%	61.690.842,00	24,61%	61.690.842,00	24,61	28,56	24,61	61.690.842,00	24,61	28,56		
	4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD (RENSTRA)	Capaian Disiplin Aparatur	95,00%	22.867.000,00	0,00%	0	100,00%	22.867.000,00	12,20%	3.691.472,00	12,20%	3.691.472,00	12,2	16,14	12,2	3.691.472,00	12,84	16,14		
	4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	16,00 Dokumen	20.210.000,00	0,00 Dokumen	0	8,00 Dokumen	20.210.000,00	1,60 Dokumen	3.325.772,00	1,60 Dokumen	3.325.772,00	20	16,46	1,6	3.325.772,00	10	16,46		

	4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	46,00 Laporan	4.092.000,00	0,00 Laporan	0	23,00 Laporan	4.092.000,00	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0							
	4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	24,00 Laporan	8.818.900,00	0,00 Laporan	0	12,00 Laporan	8.818.900,00	3,00 Laporan	2.332.600,00	3,00 Laporan	2.332.600,00	25	26,45	3	2.332.600,00	12,5	26,45								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																16,4	17,52			11,99	17,52									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																SR	SR			SR	SR									
	4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan (RENSTRA)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	16,00 Jumlah	303.055.900,00	0,00 Jumlah	0	0,00 Jumlah	208.567.600,00	0,00 Jumlah	24.278.738,00	0,00 Jumlah	24.278.738,00	24,09	11,64	0	24.278.738,00	0	8,01	Bagian Hukum dan HAM							
						Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	0,00 Persen		0,00 Persen	100,00 Persen		24,09 Persen	24,09 Persen				24,09													
	4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	100,00 Persen	291.420.600,00	0,00 Persen	0	100,00 Persen	190.435.300,00	13,94 Persen	22.440.238,00	13,94 Persen	22.440.238,00	13,94	11,78	13,94	22.440.238,00	13,94	7,7								
	4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD (RENSTRA)	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0,00 Persen	0	0	0	0	0	0	0								
	4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Tersedianya Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD (Dokumen)	18,00 Dokumen	5.248.000,00	0,00 Dokumen	0	8,00 Dokumen	5.773.000,00	3,00 Dokumen	930.000,00	3,00 Dokumen	930.000,00	37,5	16,11	3	930.000,00	16,67	17,72								
	4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	138,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0	0	0	0	0	0								

	4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu (laporan)	24,00 laporan	6.387.300,00	0,00 Laporan	0	12,00 Laporan	12.359.300,00	3,00 Laporan	908.500,00	3,00 Laporan	908.500,00	25	7,35	3	908.500,00	12,5	14,22		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	25,5	11,75			10,78	9,91		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR			SR	SR		
	4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan (RENSTRA)	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	16,00 jumlah	150.097.400,00	0,00 jumlah	0	0,00 jumlah	159.725.900,00	0,00 jumlah	20.363.116,00	0,00 jumlah	20.363.116,00	60,94	12,75	0	20.363.116,00	0	13,57	Bagian Perekonomian	
						Persentase rata-rata output kegiatan	0,00 persen		0,00 persen		100,00 persen		60,94 persen		60,94 persen		60,94							
	4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100,00 persen	136.531.000,00	0,00 persen	0	100,00 persen	136.726.000,00	25,00 persen	17.578.816,00	25,00 persen	17.578.816,00	25	12,86	25	17.578.816,00	25	12,88		
	4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD (RENSTRA)	Capaian disiplin aparatur	90,00 persen	1.098.000,00	0,00 persen	0	100,00 persen	1.573.000,00	90,00 persen	0	90,00 persen	0	90	0	90	0	100	0		
	4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD	18,00 dokumen	2.963.000,00	0,00 dokumen	0	8,00 dokumen	3.653.000,00	1,00 dokumen	785.000,00	1,00 dokumen	785.000,00	12,5	21,49	1	785.000,00	5,56	26,49		
	4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	46,00 laporan	910.000,00	0,00 laporan	0	23,00 laporan	1.333.000,00	6,00 laporan	0	6,00 laporan	0	26,09	0	6	0	13,04	0		
	4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	12,00 laporan	8.595.400,00	0,00 laporan	0	100,00 laporan	16.440.900,00	3,00 laporan	1.999.300,00	3,00 laporan	1.999.300,00	3	12,16	3	1.999.300,00	25	23,26		

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	31,3	9,3			33,72	12,53		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR			SR	SR		
	4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan (RENSTRA)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	16,00 Nilai	220.624.000,00	0,00 Nilai	0	0,00 Nilai	207.784.000,00	0,00 Nilai	3.725.772,00	0,00 Nilai	3.725.772,00	0	1,79	0	3.725.772,00	0	1,69	Kepala Bagian Pemerintahan	
						Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	0,00 persen		0,00 persen		100,00 persen		0,00 persen		0,00 persen			0						
	4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00 persen	165.124.000,00	0,00 persen	0	100,00 persen	152.284.000,00	3,03 persen	3.725.772,00	3,03 persen	3.725.772,00	3,03	2,45	3,03	3.725.772,00	3,03	2,26		
	4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD (RENSTRA)	Capaian Disiplin Aparatur	100,00 persen	3.600.000,00	0,00 persen	0	100,00 persen	3.600.000,00	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0	0	0	0	0	0		
	4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Dokumen Perencanaan Tersedia Tepat Waktu	8,00 dokumen	5.400.000,00	0,00 dokumen	0	8,00 dokumen	5.400.000,00	0,00 dokumen	0	0,00 dokumen	0	0	0	0	0	0	0		
	4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	12,00 Laporan	5.500.000,00	0,00 Laporan	0	12,00 Laporan	5.500.000,00	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0	0	0	0	0	0		
	4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12,00 Laporan	41.000.000,00	0,00 Laporan	0	12,00 Laporan	41.000.000,00	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0	0	0	0	0	0		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	0,61	0,49			0,61	0,45		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR			SR	SR		
	4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan (RENSTRA)	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat	0	3.442.744.093,00	0	0	0	3.453.394.093,00	0	297.086.568,00	0	297.086.568,00	20,3	8,6	0	297.086.568,00	0	8,63		

						daerah																		
						Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	16,00 persen		0,00 persen		0,00 persen		0,00 persen			0								
						Persentase rata-rata capaian output kegiatan	0,00 persen		0,00 persen		100,00 persen		20,30 persen			20,3								
	4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasaran Aparatur Sekretariat daerah	100,00 persen	3.242.353.093,00	0,00 persen	0	100,00 persen	3.216.328.093,00	7,80 persen	296.946.568,00	7,80 persen	296.946.568,00	7,8	9,23	7,8	296.946.568,00	7,8	9,16		
	4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Dokumen perencanaan dan Penganggaran	4,00 dokumen	8.559.000,00	0,00 dokumen	0	4,00 dokumen	8.559.000,00	1,00 dokumen	140.000,00	1,00 dokumen	140.000,00	25	1,64	1	140.000,00	25	1,64		
	4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Laporan Kinerja terkirim tepat Waktu	12,00 laporan	6.864.000,00	0,00 laporan	0	12,00 laporan	6.864.000,00	0,00 laporan	0	0,00 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan Keuangan terkirim tepat waktu	12,00 lapoaran	184.968.000,00	0,00 lapoaran	0	12,00 lapoaran	221.643.000,00	0,00 lapoaran	0	0,00 lapoaran	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																8,2	2,72			8,2	2,7			
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																SR	SR			SR	SR			
	4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan (RENSTRA)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	21,00 point	632.329.900,00	0,00 point	0	0,00 point	463.150.500,00	0,00 point	35.233.921,00	0,00 point	35.233.921,00	25	7,61	0	35.233.921,00	0	5,57	Bagian Humas dan Protokol	

						Presentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	0,00 Persen		0,00 Persen		100,00 Persen		25,00 Persen		25,00 Persen		25								
	4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	90,00 Persen	611.094.000,00	0,00 Persen	0	100,00 Persen	435.706.000,00	25,00 Persen	33.718.921,00	25,00 Persen	33.718.921,00	25	7,74	25	33.718.921,00	27,78	5,52			
	4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD (RENSTRA)	Capaian Disiplin Aparatur	50,38 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD tersedia tepat waktu	8,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0			
	4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	23,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0,00 Laporan	0	0	0	0	0	0	0			
	4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12,00 Laporan	21.235.900,00	0,00 Laporan	0	12,00 Laporan	27.444.500,00	3,00 Laporan	1.515.000,00	3,00 Laporan	1.515.000,00	25	5,52	3	1.515.000,00	25	7,13			
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	25	6,63			10,56	2,53			
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR			SR	SR			
	4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatian (RENSTRA)	indek reformasi birokrasi perangkat daerah	16,00 point	20.932.983.420,64	0,00 point	0	0,00 point	1.304.915.800,00	0,00 point	115.663.220,00	0,00 point	115.663.220,00	24,16	8,86	0	115.663.220,00	0	0,55	Kepala Bagian Umum Setda Kab.Klungkung		
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0		0	0		0	0	0		0			0						

						Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	0,00 Persen		0,00 Persen		100,00 Persen		24,16 Persen		24,16 Persen			24,16						
	4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00 persen	17.437.684.632,00	0,00 persen	0	100,00 persen	466.834.000,00	25,00 persen	11.485.722,00	25,00 persen	11.485.722,00	25	2,46	25	11.485.722,00	25	0,07		
	4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD (RENSTRA)	Persentase Capaian Disiplin Aparatur Setahun	95,00 Persen	2.896.270.888,64	0,00 Persen	0	100,00 Persen	748.491.900,00	25,00 Persen	86.079.098,00	25,00 Persen	86.079.098,00	25	11,5	25	86.079.098,00	26,32	2,97		
	4	1	9	3	Pengelolaan Kearsipan (RENSTRA)	Cakupan Surat-surat terdistribusi sesuai SOP	100,00 surat	129.122.500,00	0,00 surat	0	17.000,00 surat	24.866.000,00	0,00 surat	4.510.000,00	0,00 surat	4.510.000,00	0	18,14	0	4.510.000,00	0	3,49		
						Jumlah Surat-surat terdistribusi sesuai SOP setahun	0,00 surat		0,00 surat		0,00 surat		2.829,00 surat		2,00 surat				2					
	4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD tersedia tepat waktu	8,00 bulan	103.777.000,00	0,00 bulan	0	8,00 bulan	6.913.400,00	0,00 bulan	2.439.400,00	0,00 bulan	2.439.400,00	0	35,29	0	2.439.400,00	0	2,35		
						Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD Setahun	0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		2,00 Dokumen		2,00 Dokumen				2					
	4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Jumlah Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu setahun	0,00 laporan	39.083.500,00	0,00 laporan	0	0,00 laporan	5.492.500,00	3,00 laporan	0	3,00 laporan	0	0	0	3	0	0			

						Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	12,00 laporan		0,00 laporan		12,00 laporan		0,00 laporan		0,00 laporan			0						
	4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Jumlah Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Terkirim Tepat Waktu Setahun	0,00 laporan	327.044.900,00	0,00 laporan	0	0,00 laporan	52.318.000,00	3,00 laporan	11.149.000,00	3,00 laporan	11.149.000,00	0	21,31	3	11.149.000,00	0	3,41		
						Laporan keuangan Terkirim Tepat Waktu	12,00 laporan		0,00 laporan		12,00 laporan		0,00 laporan		0,00 laporan			0						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	8,33	14,78			12,83	1,61		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR			SR	SR		
	4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatian (RENSTRA)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	20,00 Point	350.568.583,00	0,00 Point	0	0,00 Point	326.815.875,00	0,00 Point	31.377.589,00	0,00 Point	31.377.589,00	41,87	9,6	0	31.377.589,00	0	8,95	Bagian Adm PBJ	
						Persentase rata-rata output kegiatan	0,00%		0,00%		95,00%		39,78%		39,78%			39,78						
	4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RENSTRA)	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	95,00 persen	306.855.583,00	0,00 persen	0	100,00 persen	272.886.000,00	64,00 persen	26.590.589,00	64,00 persen	26.590.589,00	64	9,74	64	26.590.589,00	67,37	8,67		
	4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Dokumen perencanaan dan perencanaan tepat waktu	8,00 dokumen	5.187.500,00	0,00 dokumen	0	8,00 dokumen	5.179.375,00	3,00 dokumen	0	3,00 dokumen	0	37,5	0	3	0	37,5	0		

	4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (RENSTRA)	Laporan kinerja terkirim tepat waktu	20,00 Laporan	4.332.500,00	0,00 Laporan	0	20,00 Laporan	4.402.500,00	4,00 Laporan	0	4,00 Laporan	0	20	0	4	0	20	0		
	4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (RENSTRA)	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	12,00 Laporan	34.193.000,00	0,00 Laporan	0	12,00 Laporan	44.348.000,00	3,00 Laporan	4.787.000,00	3,00 Laporan	4.787.000,00	25	10,79	3	4.787.000,00	25	14		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	36,6	5,13			37,47	5,67		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR			SR	SR		
	4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan (PERUBAHAN)	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	0	20.932.983.420,64	0	0	0	1.304.915.800,00	0	115.663.220,00	0	115.663.220,00	35,08	8,86	0	115.663.220,00	0	0,55		
						indek reformasi birokrasi perangkat daerah	16,00 point		0,00 point	0,00 point		0,00 point		0,00 point				0						
						Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	16,00 persen		0,00 persen	0,00 persen		0,00 persen		0,00 persen				0						
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	0		0	0		0		0				0						
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	16,00 Jumlah		0,00 Jumlah	0,00 Jumlah		0,00 Jumlah		0,00 Jumlah				0						
						Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	16,00 jumlah		0,00 jumlah	0,00 jumlah		0,00 jumlah		0,00 jumlah				0						

						Persentase rata-rata output kegiatan	0,00 persen		0,00 persen		100,00 persen		60,94 persen		60,94 persen			60,94										
						Persentase rata-rata capaian output kegiatan	0,00 persen		0,00 persen		100,00 persen		20,30 persen		20,30 persen			20,3										
						Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	0,00 Persen		0,00 Persen		100,00 Persen		24,16 Persen		24,16 Persen			24,16										
						Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	0,00 Persen		0,00 Persen		100,00 Persen		24,09 Persen		24,09 Persen			24,09										
						Persentase Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	0,00 Persen		0,00 Persen		90,00 Persen		44,28 Persen		44,28 Persen			44,28										
						Persentase rata-rata output kegiatan	0,00%		0,00%		95,00%		39,78%		39,78%			39,78										
						Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan	0,00 Persen		0,00 Persen		100,00 Persen		25,00 Persen		25,00 Persen			25										
	4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (PERUBAHAN)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00 persen	17.437.684.632,00	0,00 persen	0	100,00 persen	466.834.000,00	25,00 persen	11.485.722,00	25,00 persen	11.485.722,00	25	2,46	25	11.485.722,00	25	0,07						
	4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD (PERUBAHAN)	Persentase Capaian Disiplin Aparatur Setahun	95,00 Persen	2.896.270.888,64	0,00 Persen	0	100,00 Persen	748.491.900,00	25,00 Persen	86.079.098,00	25,00 Persen	86.079.098,00	25	11,5	25	86.079.098,00	26,32	2,97						

	4	1	9	3	Pengelolaan Kearsipan (PERUBAHAN)	Cakupan Surat-surat terdistribusi sesuai SOP	100,00 surat	129.122.500,00	0,00 surat	0	17.000,00 surat	24.866.000,00	0,00 surat	4.510.000,00	0,00 surat	4.510.000,00	0	18,14	0	4.510.000,00	0	3,49		
						Jumlah Surat-surat terdistribusi sesuai SOP setahun	0,00 surat		0,00 surat		0,00 surat		2.829,00 surat		2,00 surat			2						
	4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (PERUBAHAN)	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD tersedia tepat waktu	8,00 bulan	103.777.000,00	0,00 bulan	0	8,00 bulan	6.913.400,00	0,00 bulan	2.439.400,00	0,00 bulan	2.439.400,00	0	35,29	0	2.439.400,00	0	2,35		
						Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD Setahun	0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		2,00 Dokumen		2,00 Dokumen			2						
	4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (PERUBAHAN)	Jumlah Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu setahun	0,00 laporan	39.083.500,00	0,00 laporan	0	0,00 laporan	5.492.500,00	3,00 laporan	0	3,00 laporan	0	0	0	3	0	0	0		
						Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	12,00 laporan		0,00 laporan		12,00 laporan		0,00 laporan		0,00 laporan			0						
	4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD (PERUBAHAN)	Jumlah Laporan keuangan Sekretariat Daerah Terkirim Tepat Waktu Setahun	0,00 laporan	327.044.900,00	0,00 laporan	0	0,00 laporan	52.318.000,00	3,00 laporan	11.149.000,00	3,00 laporan	11.149.000,00	0	21,31	3	11.149.000,00	0	3,41		

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	47,8	23,79			44,51	21,29		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR			SR	SR		
	4	1	1	6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (RENSTRA)	Jumlah Paket pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat	100,00 persen	477.699.904,00	0,00 persen	0	100,00 persen	467.049.904,00	40,00 persen	9.600.000,00	40,00 persen	9.600.000,00	40	2,06	40	9.600.000,00	40	2,01	Kepala Bagian ADM pembangunan	
	4	1	1	6	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (RENSTRA)	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Masuk	50,00 Aspirasi	477.699.904,00	0,00 Aspirasi	0	50,00 Aspirasi	467.049.904,00	20,00 Aspirasi	9.600.000,00	20,00 Aspirasi	9.600.000,00	40	2,06	20	9.600.000,00	40	2,01		
						Jumlah Rekomendasi dalam Monitoring dan Evaluasi	50,00 Rekomendasi		0,00 Rekomendasi	50,00 Rekomendasi	20,00 Rekomendasi		20,00 Rekomendasi		20									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	40	2,06			40	2,01		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR			SR	SR		
	4	1	1	6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (RENSTRA)	Tingkat Kepuasan atas Layanan Kehumasan dan Keprotokolanan	100,00 Persen	26.297.173.889,00	0,00 Persen	0	0,00 Persen	5.987.815,000,00	0,00 Persen	459.249.628,00	0,00 Persen	459.249.628,00	25	7,67	0	459.249.628,00	0	1,75	Bagian Humas dan Protokol Setda. Kab. Klungkung	
						Tingkat Kepuasan atas Layanan Kehumasan dan Keprotokolanan	0		0	0	0		0		0									
						Tingkat Kepuasan Tamu Daerah dan Cakupan Informasi Program Unggulan Daerah Yang Tersebar	0,00 Persen		0,00 Persen	100,00 Persen	25,00 Persen		25,00 Persen		25									

	4	1	1	2	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri (RENSTRA)	Cakupan Layanan Keprrotokolan Sesuai SOP	100,00 Persen	5.804.038.289,00	0,00 Persen	0	100,00 Persen	1.428.570.000,00	25,00 Persen	207.601.002,00	25,00 Persen	207.601.002,00	25	14,53	25	207.601.002,00	25	3,58														
	4	1	1	1	Dialog Interaktif (RENSTRA)	Cakupan Kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Yang Didokumentasikan	100,00 persen	4.159.723.600,00	0,00 persen	0	0,00 persen	984.630.000,00	0,00 persen	0	0,00 persen	0	50	0	0	0	0	0														
						Cakupan Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Yang Didokumentasikan	0		0	0	0		0		0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Jumlah Berita Yang Ditanggapi	0,00 Berita		0,00 Berita	60,00 Berita	30,00 Berita		30,00 Berita		30																					
	4	1	1	1	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (RENSTRA)	Cakupan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Yang Disebarluaskan	100,00 Persen	16.333.412.000,00	0,00 Persen	0	0,00 Persen	3.574.615.000,00	0,00 Persen	251.648.626,00	0,00 Persen	251.648.626,00	25	7,04	0	251.648.626,00	0	1,54														
						Jumlah Informasi Pembangunan Daerah Yang Disebarluaskan	0,00 Informasi		0,00 Informasi	360,00 Informasi	90,00 Informasi		90,00 Informasi		90																					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	33,3	7,19			25	3,58														
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR			SR	SR														

	4	1	1	6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (RENSTRA)	Pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpenuhi Tepat Waktu	100,00 persen	27.975.944.410,74	0,00 persen	0	100,00 persen	3.632.033.692,00	25,00 persen	579.968.936,00	25,00 persen	579.968.936,00	25	15,97	25	579.968.936,00	25	2,07	Kepala Bagian Umum Setda Kab.Klungkung		
	4	1	1	6	9	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (RENSTRA)	Cakupan Layanan Pimpinan Daerah	100,00 persen	9.137.322.582,58	0,00 persen	0	3,00 persen	0	0,00 persen	203.848.983,00	0,00 persen	203.848.983,00	0	0	0	203.848.983,00	0	2,23		
						Persentase Cakupan Pelayanan Pemimpin Daerah Setahun	0,00 Persen	0,00 Persen		0,00 Persen	25,00 Persen	25,00 Persen	25												
	4	1	1	6	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan (RENSTRA)	Jumlah Bulan Rumah Jabatan Dalam Kondisi Baik	100,00 Persen	3.599.169.500,00	0,00 Persen	0	12,00 Persen	926.089.500,00	0,00 Persen	58.989.162,00	0,00 Persen	58.989.162,00	0	6,37	0	58.989.162,00	0	1,64		
						Jumlah Bulan Rumah Jabatan Dalam Kondisi baik setahun	0,00 bulan	0,00 bulan		0,00 bulan	3,00 bulan	3,00 bulan	3												
	4	1	1	6	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (RENSTRA)	Jumlah Bulan Mobil Jabatan Dalam Kondisi Baik setahun	0,00 bulan	3.613.258.760,00	0,00 bulan	0	0,00 bulan	677.110.664,00	3,00 bulan	147.924.191,00	3,00 bulan	147.924.191,00	0	21,85	3	147.924.191,00	0	4,09		
						Persentase Mobil Jabatan Dalam Kondisi Baik	0,00 bulan	0,00 bulan		12,00 bulan	0,00 bulan	0,00 bulan	0												
						Presentase Mobil Jabatan Dalam Kondisi Baik	100,00 Persen	0,00 Persen		0,00 Persen	0,00 Persen	0,00 Persen	0,00 Persen	0											
	4	1	1	6	4	Kegiatan Pelayanan dan Koordinasi Kedinasan Pejabat Daerah (RENSTRA)	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pejabat Daerah	100,00 Persen	11.626.193.568,16	0,00 Persen	0	90,00 Persen	2.028.833.528,00	0,00 Persen	169.206.600,00	0,00 Persen	169.206.600,00	0	8,34	0	169.206.600,00	0	1,46		

						Persentase Cakupan Pelayanan Kedinasan Pejabat Setahun	0,00 Persen		0,00 Persen		0,00 Persen		25,00 Persen		25,00 Persen			25													
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	0	12,19			0	4,09									
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	SR	SR			SR	SR									
	4	1	2	6		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (RENSTRA)	Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang hukum dan HAM.	100,00 persen	5.809.344.993,00	0,00 persen	0	100,00 persen	1.073.301.800,00	50,00 persen	97.687.800,00	50,00 persen	97.687.800,00	41,33	9,1	50	97.687.800,00	26,6	1,68	Bagian Hukum dan HAM							
							Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan	6.007,00 Peraturan		0,00 Peraturan		588,00 Peraturan		192,00 Peraturan		192,00 Peraturan			192												
	4	1	2	6	1	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan (RENSTRA)	jumlah kebijakan bidang hukum dan HAM yang ditetapkan	0,00 buah	2.053.783.340,00	0,00 buah	0	1,00 buah	310.785.000,00	0,00 buah	34.107.800,00	0,00 buah	34.107.800,00	0	10,97	0	34.107.800,00	3,57	1,66								
							jumlah kebijakan bidang hukum dan ham yang ditetapkan	6,00 kebijakan		0,00 kebijakan		0,00 kebijakan		0,00 kebijakan		0,00 kebijakan			0												
							Cakupan Perkara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Yang Difasilitasi	100,00 persen		0,00 persen		100,00 persen		0,00 persen		0,00 persen			0												
							Jumlah kebijakan bidang hukum dan HAM yang ditetapkan	0		0		0		0		0			0												

						Persentase capaian RAD HAM.	0,00 Persen		0,00 Persen		100,00 Persen		0,00 Persen		0,00 Persen		0							
						Persentase capaian RAD HAM.	100,00 Persen		0,00 Persen		0,00 Persen		25,00 Persen		25,00 Persen		25							
						Persentase jumlah kebijakan bidang hukum dan HAM yang ditetapkan	0,00 Persen		0,00 Persen		0,00 Persen		50,00 Persen		50,00 Persen		50							
	4	1	2 6	3	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (RENSTRA)	Jumlah rancangan produk hukum daerah tepat waktu	0,00 Peraturan	2.350.976.760,00	0,00 Peraturan	0	588,00 Peraturan	385.754.800,00	0,00 Peraturan	50.810.000,00	0,00 Peraturan	50.810.000,00	0	13,17	0	50.810.000,00	0	2,16		
						Persentase rancangan produk hukum daerah tepat waktu	0,00 persen		0,00 persen		0,00 persen		38,40 persen		38,40 persen		38,4							
						Rancangan produk hukum daerah tepat waktu	6.007,00 produk hukum		0,00 produk hukum		0,00 produk hukum		0,00 produk hukum		0,00 produk hukum		0							
	4	1	2 6	5	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan (RENSTRA)	Desa Binaan Sadar hukum (Jml Desa 59, Desa sadar Hukum 10)	50,00 Desa Binaan Sadar Hukum	1.404.584.893,00	0,00 Desa Binaan Sadar Hukum	0	0,00 Desa Binaan Sadar Hukum	376.762.000,00	0,00 Desa Binaan Sadar Hukum	12.770.000,00	0,00 Desa Binaan Sadar Hukum	12.770.000,00	0	3,39	0	12.770.000,00	0	0,91		
						Cakupan Dokumen hukum yang dipublikasikan	100,00 Persen		0,00 Persen		0,00 Persen		0,00 Persen		0,00 Persen		0							
						Jumlah Desa Sadar hukum	0,00 Desa		0,00 Desa		8,00 Desa		0,00 Desa		0,00 Desa		0							
						Jumlah Desa Pakraman memiliki awig-awig tertulis yang dikukuhkan	0,00 Desa		0,00 Desa		2,00 Desa		0,00 Desa		0,00 Desa		0							

						Bupati																		
						Persentase Desa Pakraman memiliki awig-awig tertulis yang dikukuhkan Bupati (jumlah DP 109, data awal 66)	0,00 Persen		0,00 Persen	0,00 Persen	100,00 Persen		100,00 Persen					100						
						Persentase Desa Sadar hukum	0,00 persen		0,00 persen	0,00 persen	25,00 persen		25,00 persen					25						
						Rekomendasi terhadap Awig-awig Desa pakraman yang dikukuhkan Bupati (jumlah DP 112)	122,00 Desa Pakraman		0,00 Desa Pakraman	0,00 Desa Pakraman	0,00 Desa Pakraman		0,00 Desa Pakraman					0						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)														0	9,18		0	1,54						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan														SR	SR		SR	SR						
	4	1	3	3		Program Pengembangan Otonomi Daerah (RENSTRA)	Cakupan Terpenuhi Kebijakan Bidang Pemerintahan	100,00 100	5.381.326.086, 72	0,00 100	0	100,00 100	1.013.440.00 0,00	0,00 100	34.664.000, 00	0,00 100	34.664.000, 00	0	3,42	0	34.664.000, 00	0	0,64	Kabag Pemerintahan
	4	1	3	3	4	Pembuatan Buku Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RENSTRA)	LPPD dan ILPPD Terkirim Tepat Waktu	2,00 Laporan	379.155.000,0 0	0,00 Laporan	0	2,00 Laporan	65.800.000,0 0	11,49 Laporan	6.720.000,0 0	11,49 Laporan	6.720.000,0 0	574, 5	10,2 1	11,4 9	6.720.000,0 0	574, 5	1,77	

	4	1	3	1	3	1	Pelimpahan Kewenangan Kepada Bupati Camat (RENSTRA)	Jumlah Rekomendasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang Ditindaklanjuti	24,00 Rekomendasi	371.462.000,00	0,00 Rekomendasi	0	4,00 Rekomendasi	59.260.000,00	0,00 Rekomendasi	0	0,00 Rekomendasi	0	0	0	0	0	0					
	4	1	3	1	3	4	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah (RENSTRA)	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti	26,00 Rekomendasi	2.943.220.500,00	0,00 Rekomendasi	0	4,00 Rekomendasi	569.950.000,00	0,00 Rekomendasi	0	0,00 Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0				
	4	1	3	1	3	5	Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Daerah (RENSTRA)	Terpenuhinya Kebutuhan Kerjasama Daerah	100,00 persen	620.027.000,00	0,00 persen	0	16,00 persen	131.550.000,00	22,59 persen	27.944.000,00	22,59 persen	27.944.000,00	141,2	21,24	22,59	27.944.000,00	22,59	4,51				
	4	1	3	1	3	7	Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan atau Desa (RENSTRA)	Jumlah Rekomendasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan/atau Desa yang Ditindaklanjuti	24,00 Rekomendasi	310.289.000,00	0,00 Rekomendasi	0	4,00 Rekomendasi	61.930.000,00	0,00 Rekomendasi	0	0,00 Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0				
	4	1	3	1	3	8	Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan (RENSTRA)	Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan	36,00 Kebijakan	757.172.586,72	0,00 Kebijakan	0	13,00 Kebijakan	124.950.000,00	0,00 Kebijakan	0	0,00 Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0				
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																		119	5,24				99,52	1,05				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																		ST	SR				ST	SR				
	4	1	4	6			Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA)	Nilai Evaluasi Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0,00 Nilai	310.269.000,00	0,00 Nilai	0	80,00 Nilai	357.050.000,00	0,00 Nilai	31.888.525,00	0,00 Nilai	31.888.525,00	0	8,93	0	31.888.525,00	0	10,28				

						Unit Kerja Yang Menerapkan Standar Pelayanan Publik	10,00 Nilai		0,00 Nilai		0,00 Nilai		0,00 Nilai			0									
	4	1	4	1	Pembentukan dan Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA)	Buku Anjab dan ABK Tersedia Tepat Waktu	0,00 Dokumen	147.265.500,00	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	194.374.500,00	3,00 Dokumen	27.125.800,00	3,00 Dokumen	27.125.800,00	0	13,96	3	27.125.800,00	0	18,42			
						Peraturan dan Keputusan Bupati tentang Kelas Jabatan Tersedia Tepat Waktu	0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		5,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen			0							
						Perbup Kelas dan Nilai Jabatan Tersedia Tepat Waktu	0		0		0		0		0				0						
						Perbup Nilai Jabatan Tersedia Tepat Waktu	1,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen				0						
						Revisi Peraturan Tentang Perangkat Daerah Tersedia Tepat Waktu	0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen				0						
						Revisi Perbup Uraian Tugas Tersedia Tepat Waktu	1,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen				0						
	4	1	4	2	Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA)	Aksi Pelayanan Publik Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	8,00 Aksi	163.003.500,00	0,00 Aksi	0	0,00 Aksi	162.675.500,00	0,00 Aksi	4.762.725,00	0,00 Aksi	4.762.725,00	0	2,93	0	4.762.725,00	0	2,92			

					Aksi Pelayanan Publik Pada Kompetisi Pelayanan Publik Terkirim Tepat Waktu	0,00 Aksi		0,00 Aksi		8,00 Aksi		0,00 Aksi		0,00 Aksi			0						
					Inovasi Pelayanan Publik Pada Kompetisi Pelayanan Publik Terkirim Tepat Waktu	0		0		0		0		0			0						
					Peraturan Bupati Tentang SOP Tersedia Tepat Waktu	0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		6,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen			0						
					SK Peta Proses Bisnis Tersedia Tepat Waktu	0		0		0		0		0			0						
					Tersedianya PerKaDa tentang SOP	4,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen		0,00 Dokumen			0						
					Unit Kerja Yang Menerapkan Standar Pelayanan Publik	0,00 Unit Kerja		0,00 Unit Kerja		0,00 Unit Kerja		8,00 Unit Kerja		8,00 Unit Kerja			8						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																0	8,45			0	18,42		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																SR	SR			SR	SR		

	4	1	4		Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah (RENSTRA)	Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang perekonomian	100,00 jumlah	4.644.162.918,00	0,00 jumlah	0	100,00 jumlah	914.956.332,00	115,00 jumlah	54.910.700,00	115,00 jumlah	54.910.700,00	115	6	115	54.910.700,00	115	1,18	Bagian Perekonomian		
	4	1	4	1	Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah (RENSTRA)	Jumlah kebijakan bidang inflasi daerah	0,00 bh	1.641.184.874,00	0,00 bh	0	1,00 bh	422.704.832,00	0,00 bh	43.360.700,00	0,00 bh	43.360.700,00	0	10,26	0	43.360.700,00	0	2,64			
						Jumlah kebijakan pengendalian inflasi daerah	6,00 kebijakan		0,00 kebijakan		0,00 kebijakan	0,00 kebijakan		0,00 kebijakan				0							
						Jumlah komoditas yang harga terkendali	0,00 komoditas		0,00 komoditas		0,00 komoditas	3,00 komoditas		3,00 komoditas				3							
	4	1	4	2	Monitoring Kinerja Penyertaan Modal Daerah (RENSTRA)	Jumlah kebijakan terkait lembaga ekonomi mikro yang ditetapkan	20,00 kebijakan	312.149.100,00	0,00 kebijakan	0	5,00 kebijakan	292.708.500,00	3,00 kebijakan	2.130.000,00	3,00 kebijakan	2.130.000,00	60	0,73	3	2.130.000,00	15	0,68			
	4	1	4	4	Monitoring Kinerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan (RENSTRA)	Jumlah kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditetapkan	3,00 Kebijakan	224.285.000,00	0,00 Kebijakan	0	1,00 Kebijakan	162.685.000,00	1,00 Kebijakan	8.460.000,00	1,00 Kebijakan	8.460.000,00	100	5,2	1	8.460.000,00	33,33	3,77			
	4	1	4	5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UMKM (RENSTRA)	Jumlah kebijakan bidang UMKM yang ditetapkan	6,00 kebijakan	546.707.816,00	0,00 kebijakan	0	1,00 kebijakan	36.858.000,00	1,00 kebijakan	960.000,00	1,00 kebijakan	960.000,00	100	2,6	1	960.000,00	16,67	0,18			
	4	1	4	6	Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD (RENSTRA)	Jumlah kebijakan terkait BUMD dan BLUD	3,00 Kebijakan	370.552.000,00	0,00 Kebijakan	0	0,00 Kebijakan	0	0,00 Kebijakan	0	0,00 Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0		

	4	1	4	7	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya Alam (RENSTRA)	jumlah kebijakan bidang sumber daya alam	6,00 kebijakan	977.406.928,00	0,00 kebijakan	0	0,00 kebijakan	0	0,00 kebijakan	0	0,00 kebijakan	0	0	0	0	0	0	0			
	4	1	4	8	Monitoring dan Evaluasi Bidang Perijinan, Investasi dan Penyertaan Modal (RENSTRA)	Jumlah kebijakan bidang perijinan, investasi dan penyertaan modal	6,00 kebijakan	571.877.200,00	0,00 kebijakan	0	0,00 kebijakan	0	0,00 kebijakan	0	0,00 kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																65	4,7			10,83	0,77				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																R	SR			SR	SR				
	4	1	5	6	Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RENSTRA)	% Harga satuan yang digunakan dalam Dokumen perencanaan	100,00 persen	63.655.550,00	0,00 persen	0	100,00 persen	63.655.550,00	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0	0	0	0	0	0	0	Kepala bagian ADM pembangunan	
	4	1	5	2	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang (RENSTRA)	Tersedianya buku satuan standar harga untuk perencanaan	50,00 buku	63.655.550,00	0,00 buku	0	50,00 buku	63.655.550,00	0,00 buku	0	0,00 buku	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	1	5	5	Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan (RENSTRA)	Laporan Teppra tersedia tepat waktu	100,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																0	0			0	0				
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																SR	SR			SR	SR				
	4	1	5	6	Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RENSTRA)	Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasa	3,40 indeks	3.954.870.418,00	0,00 indeks	0	0,00 indeks	886.795.000,00	0,00 indeks	55.113.316,00	0,00 indeks	55.113.316,00	98,44	6,21	0	55.113.316,00	0	1,39	Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa		

						Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasda	0,00 indeks		0,00 indeks		320,00 indeks		315,00 indeks		315,00 indeks		315								
	4	1	5 6	1	Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RENSTRA)	Cakupan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang diselesaikan	100,00 persen	2.747.088.000,00	0,00 persen	0	0,00 persen	621.650.000,00	0,00 persen	32.494.772,00	0,00 persen	32.494.772,00	2,27	5,23	0	32.494.772,00	0	1,18			
						Persentase paket pekerjaan yang selesai dilelangkan	0,00 persen		0,00 persen		100,00 persen		2,27 persen		2,27 persen		2,27								
	4	1	5 6	3	Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Barang/Jasa (RENSTRA)	Cakupan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Yang mendapatkan sosialisasi kebijakan PBJ	65,00 Persen	850.875.500,00	0,00 Persen	0	0,00 Persen	190.000.000,00	0,00 Persen	18.611.772,00	0,00 Persen	18.611.772,00	58,33	9,8	0	18.611.772,00	0	2,19			
						Cakupan Sengketa Kontrak Yang Difasilitasi	100,00 persen		0,00 persen		0,00 persen		0,00 persen		0,00 persen		0								
						Jumlah Sumber Daya Aparatur yang paham tentang perundang-undangan pengadaan barang/ jasa pemerintah	0,00 orang		0,00 orang		60,00 orang		35,00 orang		35,00 orang		35								
	4	1	5 6	4	Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (RENSTRA)	Cakupan Paket Pengadaan Yang Diselesaikan Secara Elektronik	25,00 Persen	356.906.918,00	0,00 Persen	0	0,00 Persen	75.145.000,00	0,00 Persen	4.006.772,00	0,00 Persen	4.006.772,00	20	5,33	0	4.006.772,00	0	1,12			

						Waktu																	
	4	1	5 8	3	Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA)	Inovasi Pelayanan Publik Terkirim Tepat Waktu ke Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	36,00 Aksi	807.890.000,00	0,00 Aksi	0	0,00 Aksi	0	0,00 Aksi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						SK Kepala Daerah tentang SOP Tersedia Tepat Waktu	1,00 Dokumen		0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0			0						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)															0	0			0	0			
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan															SR	SR			SR	SR			
	4	1	5 9		Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah (RENSTRA)	Persentase terpenuhinya skor komponen Pelaporan pada LHE AKIP Kabupaten	0,00 Persen	481.586.400,00	0,00 Persen	0	90,00 Persen	274.903.200,00	10,05 Persen	41.030.600,00	10,05 Persen	41.030.600,00	11,17	14,93	10,05	41.030.600,00	0	8,52	
						Skor komponen Pelaporan pada LHE AKIP Kabupaten	12,00 Nilai		0,00 Nilai	0	0,00 Nilai	0	0,00 Nilai	0			0						
	4	1	5 9	1	Perencanaan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA)	Perjanjian Kinerja Tersedia Tepat Waktu	2,00 Dokumen	227.208.200,00	0,00 Dokumen	0	0,00 Dokumen	0	1,00 Dokumen	30.620.600,00	1,00 Dokumen	30.620.600,00	0	0	1	30.620.600,00	50	13,48	

	4	1	5 9	2	Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA)	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Klungkung Terkirim Tepat Waktu	1,00 Dokumen	254.378.200,00	0,00 Dokumen	0	1,00 Dokumen	274.903.200,00	1,00 Dokumen	10.410.000,00	1,00 Dokumen	10.410.000,00	100	3,79	1	10.410.000,00	100	4,09		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	100	3,79			75	8,78		
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	SR			S	SR		
	4	1	6 3		Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat (RENSTRA)	Cakupan Terpenuhi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100,00%	18.959.591.412,76	0,00%	0	100,00%	3.415.447.500,00	16,39%	430.210.000,00	16,39%	430.210.000,00	16,39	12,6	16,39	430.210.000,00	16,39	2,27	Bagian Kesra	
	4	1	6 3	1	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan (RENSTRA)	Jumlah Kebijakan Bidang Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Yang Ditetapkan	6,00 Kebijakan	18.311.233.876,76	0,00 Kebijakan	0	1,00 Kebijakan	3.374.013.500,00	0,16 Kebijakan	420.940.000,00	0,16 Kebijakan	420.940.000,00	16	12,48	0,16	420.940.000,00	2,67	2,3		
	4	1	6 3	2	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata (RENSTRA)	Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata Yang Ditetapkan	6,00 Kebijakan	328.551.028,00	0,00 Kebijakan	0	0,00 Kebijakan	20.224.500,00	0,36 Kebijakan	8.310.000,00	0,36 Kebijakan	8.310.000,00	0	41,09	0,36	8.310.000,00	3	2,53		

	4	1	8	3	Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah (RENSTRA)	Laporan Hasil Evaluasi	100,00 persen	1.637.714.130,00	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0,00 persen	0	0	0	0	0	0								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																0	0			0	0								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																SR	SR			SR	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI Sekretariat Daerah																249.608.928.762,24		0		45.513.599.702		4.293.561.991		4.293.561.991			4.293.561.991		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)																30,8	8,99			20,27	2,61								
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program																SR	SR			SR	SR								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan SKPD dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap Tugas dan Fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat pemerintah yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
5. Adanya aplikasi pengolahan data yang memadai untuk penemuan kembali surat masuk dan surat keluar Sekretariat Daerah.
6. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Adanya penafsiran yang berbeda terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sering berubah dan berubah dalam jangka waktu yang pendek dan tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi yang berbeda-beda.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Klungkung pada tahun 2018 mendapat nilai B dengan point 63,54. Hal tersebut memacu Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya di tahun 2020 dan tahun – tahun mendatang.
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Klungkung pada tahun 2019 mendapat nilai CC dengan point 57,26. Sekretariat Daerah sebagai leading sector dan seluruh Pemerintah Kabupaten Klungkung diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi implementasi Reformasi birokrasi di tahun 2020 dan tahun – tahun mendatang.
3. Masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dimulai pada tahun 2019 yang menandakan tahun awal RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih, hal tersebut juga merupakan suatu tantangan, dimana dokumen perencanaan nantinya harus dapat mengakomodir Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

Bagian Pemerintahan :

1. Belum seluruh Perangkat Daerah menyampaikan Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tepat waktu sesuai dengan urusan yang dilaksanakan pada masing-masing OPD
2. Beberapa Data pendukung yang disampaikan belum lengkap dan tidak sesuai dengan format IKK

Bagian Kesejahteraan Rakyat :

1. Belum maksimalnya koordinasi terkait Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Klungkung sesuai Program UHC (Universal Health Coverage)
2. Belum maksimalnya koordinasi terkait kegiatan dibidang Sosial dan Budaya.

Bagian Perekonomian:

1. Masih adanya ego sektoral di masing-masing OPD terkait dalam upaya pengendalian inflasi.
2. Pemahaman OPD dan instansi terkait masih lemah tentang inflasi daerah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Lemahnya data/informasi yang dimiliki oleh OPD teknis sehingga pelaporan tidak bisa maksimal
4. Kurangnya sumberdaya manusia kualitas dan kuantitas sehingga cukup menghambat proses pelaksanaan tugas.

Bagian Administrasi Pembangunan:

1. Dalam pelaksanaan Inspeksi masih adanya Paket pembangunan yang tidak sesuai dengan spek dan sechedule penyelesaian.
2. Dalam pelaksanaan Temu wirasa terkadang undangan yang hadir melebihi dari undangan sehingga berakibat kekurangan persediaan makan dan minum

Bagian Umum :

1. Dalam pelaksanaan langkah - langkah proaktif guna mencapai visi dan misi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Klungkung terdapat beberapa kendala yang harus diberikan perhatian guna peningkatan kinerja pada tahun – tahun selanjutnya. Kendala pertama bersumber pada kualitas sumber daya manusia yang dituntut untuk menguasai keahlian pada bidang yang menjadi tanggung jawab masing – masing personil. Dalam pengelolaan administrasi yang sangat bersentuhan dengan pengorganisasian file-file maupun surat-surat dinas sangat membutuhkan tenaga arsiparis yang handal demi terkelolanya tatanan arsip yang sistematis, efektif dan efisien.
2. Penguasaan teknologi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Sistem teknologi merupakan katalisator sistem kerja yang dapat membantu dari beberapa aspek antara lain penghematan waktu, biaya, tenaga, dan terjaminnya akurasi data guna menyajikan laporan yang akuntabel. Keterbatasan ruang untuk penyimpanan dan pengelolaan arsip dan informasi juga menjadikan kendala membutuhkan solusi pemecahan.
3. Belum tercapainya pelayanan yang maksimal terhadap pemenuhan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Organisasi :

1. Belum seluruh SKPD menyampaikan Laporan Kinerja sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Belum seluruh SKPD menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 tepat waktu.
3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat SKPD.
4. Belum optimalnya penyusunan SOP di masing-masing SKPD.
5. Belum optimalnya pencapaian SPM ditingkat SKPD.
6. Belum optimalnya penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah yang dapat mencerminkan kebutuhan dan beban kerja perangkat daerah secara objektif.
7. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah hendaknya didasarkan terhadap Analisa kebutuhan organisasi dan memepertimbangkan prinsip-prinsip manajemen yang baik sehingga dapat berkinerja dengan maksimal. Namun beberapa Struktur Organisasi Perangkat Daerah memerlukan Revisi karena belum dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan internal maupun eksternal pelaksanaan birokrasi.
8. Uraian tugas perangkat daerah merupakan kiblat organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan maupun tugas dan tanggungjawabnya, namun beberapa uraian tugas perangkat daerah tumpang tindih baik antara perangkat daerah maupun didalam internal perangkat daerah, sehingga seringkali tidak dapat menjadi suatu kiblat dalam menentukan Batasan wewenang antar perangkat daerah, maupun antar sub bagian organisasi didalam perangkat daerah.

Pada tingkat teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pada bagian/unit kerja masih kurang.
2. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja dan peralatan yang digunakan belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung yaitu Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kab. Klungkung dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Klungkung sebagaimana Lampiran 2.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat peranan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat Daerah tidak langsung menjalankan program dan kegiatan masyarakat. Peranan Sekretariat Daerah adalah mengoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang masuk ke Sekretariat Daerah kepada instansi teknis yang menangani.

LAMPIRAN 2

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Pelayanan Kesekretariatan		indek reformasi birokrasi perangkat daerah	13.00 point	4.348.853.266,64	Program Pelayanan Kesekretariatan		indek reformasi birokrasi perangkat daerah	13.00 point	4.348.853.266,64	
	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Bagian Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 persen	3.681.730.094,00	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Bagian Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 persen	3.681.730.094,00	
	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Bagian Umum	Capaian Disiplin Aparatur	80.00 Persen	537.704.122,64	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Bagian Umum	Capaian Disiplin Aparatur	80.00 Persen	537.704.122,64	
	Pengelolaan Kearsipan	Bagian Umum	Cakupan Surat-surat terdistribusi sesuai SOP	100.00 surat	21.094.500,00	Pengelolaan Kearsipan	Bagian Umum	Cakupan Surat-surat terdistribusi sesuai SOP	100.00 surat	21.094.500,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Bagian Umum	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD tersedia tepat waktu	8.00 bulan	26.673.150,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Bagian Umum	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD tersedia tepat waktu	8.00 bulan	26.673.150,00	
	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Bagian Umum	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	23.00 laporan	10.804.500,00	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Bagian Umum	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	23.00 laporan	10.804.500,00	
	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Bagian Umum	Laporan keuangan Terkirim Tepat Waktu	12.00 laporan	70.846.900,00	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Bagian Umum	Laporan keuangan Terkirim Tepat Waktu	12.00 laporan	70.846.900,00	
2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpenuhi Tepat Waktu	100.00 persen	4.959.845.251,00	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpenuhi Tepat Waktu	100.00 persen	4.959.845.251,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Cakupan layanan pimpinan daerah	100.00 persen	1.849.619.264,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Cakupan layanan pimpinan daerah	100.00 persen	1.849.619.264,00	

	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Bagian Umum	Prosentase Rumah Jabatan Dalam Kondisi Baik	100.00 bulan	629.395.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Bagian Umum	Prosentase Rumah Jabatan Dalam Kondisi Baik	100.00 bulan	629.395.000,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Bagian Umum	Prosentase Mobil Jabatan Dalam Kondisi Baik	100.00 12	701.037.024,00	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Bagian Umum	Prosentase Mobil Jabatan Dalam Kondisi Baik	100.00 12	701.037.024,00	
	Kegiatan Pelayanan dan Koordinasi Kedinasan Pejabat Daerah	Bagian Umum	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pejabat Daerah	100.00 Persen	1.779.793.963,00	Kegiatan Pelayanan dan Koordinasi Kedinasan Pejabat Daerah	Bagian Umum	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pejabat Daerah	100.00 Persen	1.779.793.963,00	
3	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Tingkat Kepuasan atas Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	100.00 Persen	4.337.523.789,00	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Tingkat Kepuasan atas Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	100.00 Persen	4.337.523.789,00	
	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Bag. Humas	Cakupan Layanan Keprotokolan Sesuai SOP	100.00 Persen	760.296.789,00	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Bag. Humas	Cakupan Layanan Keprotokolan Sesuai SOP	100.00 Persen	760.296.789,00	
	Dialog Interaktif	Bag. Humas	Cakupan Kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Yang Didokumentasikan	100.00 persen	697.055.400,00	Dialog Interaktif	Bag. Humas	Cakupan Kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Yang Didokumentasikan	100.00 persen	697.055.400,00	
	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Bag. Humas	Cakupan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Yang Disebarluaskan	100.00 Persen	2.880.171.600,00	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Bag. Humas	Cakupan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Yang Disebarluaskan	100.00 Persen	2.880.171.600,00	
4	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan	588.00 Peraturan	1.114.380.325,00	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan	588.00 Peraturan	1.114.380.325,00	
Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang hukum dan HAM.			100.00 persen	Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang hukum dan HAM.				100.00 persen			
	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Bag. Hukum	jumlah kebijakan bidang hukum dn ham yang ditetapkan	1.00 kebijakan	385.059.835,00	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Bag. Hukum	jumlah kebijakan bidang hukum dn ham yang ditetapkan	1.00 kebijakan	385.059.835,00	

			Persentase capaian RAD HAM.	100.00 Persen				Persentase capaian RAD HAM.	100.00 Persen		
			Cakupan Perkara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang difasilitasi	100.00 persen				Cakupan Perkara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang difasilitasi	100.00 persen		
	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Bag. Hukum	Rancangan produk hukum daerah tepat waktu	588.00 produk hukum	475.625.690,00	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Bag. Hukum	Rancangan produk hukum daerah tepat waktu	588.00 produk hukum	475.625.690,00	
	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Bag. Hukum	Desa Binaan Sadar hukum (Jml Desa 59, Desa sadar Hukum 10)	8.00 Desa Binaan Sadar Hukum	253.694.800,00	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Bag. Hukum	Desa Binaan Sadar hukum (Jml Desa 59, Desa sadar Hukum 10)	8.00 Desa Binaan Sadar Hukum	253.694.800,00	
Rekomendasi terhadap Awig -awig Desa pakraman yang dikukuhkan Bupati (jumlah DP 112)			2.00 Desa Pakraman	Rekomendasi terhadap Awig -awig Desa pakraman yang dikukuhkan Bupati (jumlah DP 112)				2.00 Desa Pakraman			
Cakupan Dokumen hukum yang dipublikasikan			100.00 Persen	Cakupan Dokumen hukum yang dipublikasikan				100.00 Persen			
5	Program Pengembangan Otonomi Daerah		Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Pemerintahan	100.00 100	950.466.086,72	Program Pengembangan Otonomi Daerah		Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Pemerintahan	100.00 100	950.466.086,72	
	Pembuatan Buku Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bag. Pemerintahan	LPPD dan ILPPD Terkirim Tepat Waktu	2.00 Laporan	77.840.000,00	Pembuatan Buku Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bag. Pemerintahan	LPPD dan ILPPD Terkirim Tepat Waktu	2.00 Laporan	77.840.000,00	
	Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat	Bag. Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang Ditindaklanjuti	4.00 Rekomendasi	63.145.000,00	Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat	Bag. Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang Ditindaklanjuti	4.00 Rekomendasi	63.145.000,00	

	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah	Bag. Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti	4.00 Rekomendasi	546.605.000,00	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah	Bag. Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti	4.00 Rekomendasi	546.605.000,00	
	Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Daerah	Bag. Pemerintahan	Terpenuhinya Kebutuhan Kerjasama Daerah	100.00 persen	116.862.500,00	Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Daerah	Bag. Pemerintahan	Terpenuhinya Kebutuhan Kerjasama Daerah	100.00 persen	116.862.500,00	
	Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan atau Desa	Bag. Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan/atau Desa yang Ditindaklanjuti	4.00 Rekomendasi	52.225.000,00	Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan atau Desa	Bag. Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan/atau Desa yang Ditindaklanjuti	4.00 Rekomendasi	52.225.000,00	
	Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan	Bag. Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan	6.00 Kebijakan	93.788.586,72	Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan	Bag. Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan	6.00 Kebijakan	93.788.586,72	
6	Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah		Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang perekonomian	100.00 jumlah	895.135.982,00	Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah		Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang perekonomian	100.00 jumlah	895.135.982,00	
	Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah	Bag. Perekonomian	Jumlah kebijakan pengendalian inflasi daerah	1.00 kebijakan	314.571.246,00	Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah	Bag. Perekonomian	Jumlah kebijakan pengendalian inflasi daerah	1.00 kebijakan	314.571.246,00	
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UMKM	Bag. Perekonomian	Jumlah kebijakan bidang UMKM yang ditetapkan	1.00 kebijakan	110.873.204,00	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UMKM	Bag. Perekonomian	Jumlah kebijakan bidang UMKM yang ditetapkan	1.00 kebijakan	110.873.204,00	
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD	Bag. Perekonomian	Jumlah kebijakan terkait BUMD dan BLUD	1.00 Kebijakan	86.158.000,00	Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD	Bag. Perekonomian	Jumlah kebijakan terkait BUMD dan BLUD	1.00 Kebijakan	86.158.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya Alam	Bag. Perekonomian	jumlah kebijakan bidang sumber daya alam	2.00 kebijakan	242.796.732,00	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya Alam	Bag. Perekonomian	jumlah kebijakan bidang sumber daya alam	2.00 kebijakan	242.796.732,00	
	Monitoring dan Evaluasi Bidang Perijinan, Investasi dan Penyertaan Modal	Bag. Perekonomian	Jumlah kebijakan bidang perijinan, investasi dan penyertaan modal	5.00 kebijakan	140.736.800,00	Monitoring dan Evaluasi Bidang Perijinan, Investasi dan Penyertaan Modal	Bag. Perekonomian	Jumlah kebijakan bidang perijinan, investasi dan penyertaan modal	5.00 kebijakan	140.736.800,00	

7	Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasa	3.25 indeks	620.857.500,00	Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasa	3.25 indeks	620.857.500,00	
	Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bag. Adm. PBJ	Cakupan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang diselesaikan	100.00 persen	410.593.500,00	Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bag. Adm. PBJ	Cakupan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang diselesaikan	100.00 persen	410.593.500,00	
	Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Barang/Jasa	Bag. Adm PBJ	Cakupan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Yang mendapatkan sosialisasi kebijakan PBJ	35.00 Persen	137.203.500,00	Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Barang/Jasa	Bag. Adm PBJ	Cakupan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Yang mendapatkan sosialisasi kebijakan PBJ	35.00 Persen	137.203.500,00	
			Cakupan Sengketa Kontrak Yang Difasilitasi	100.00 persen				Cakupan Sengketa Kontrak Yang Difasilitasi	100.00 persen		
	Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Bag. Adm PBJ	Cakupan Paket Pengadaan Yang Diselesaikan Secara Elektronik	3.00 Persen	73.060.500,00	Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Bag. Adm PBJ	Cakupan Paket Pengadaan Yang Diselesaikan Secara Elektronik	3.00 Persen	73.060.500,00	
8	Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Persentase Pencapaian Target-Target Tahapan Reformasi Birokrasi	82.00 Persen	1.357.921.064,00	Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Persentase Pencapaian Target-Target Tahapan Reformasi Birokrasi	82.00 Persen	1.357.921.064,00	
	Perencanaan~ Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Laporan Reformasi Birokrasi Terkirim Tepat Waktu	1.00 Dokumen	899.984.264,00	Perencanaan~ Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Laporan Reformasi Birokrasi Terkirim Tepat Waktu	1.00 Dokumen	899.984.264,00	
			Dokumen SAKIP Kabupaten Klungkung Tersedia Tepat Waktu	1.00 Gabung				Dokumen SAKIP Kabupaten Klungkung Tersedia Tepat Waktu	1.00 Gabung		
	Peningkatan Efektifitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Perbup Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Tersedia Tepat Waktu	0.00 Dokumen	238.751.800,00	Peningkatan Efektifitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Perbup Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Tersedia Tepat Waktu	0.00 Dokumen	238.751.800,00	
			Perbup Kelas Jabatan Tersedia Tepat Waktu	1.00 Dokumen				Perbup Kelas Jabatan Tersedia Tepat Waktu	1.00 Dokumen		

	Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	SK Kepala Daerah tentang SOP Tersedia Tepat Waktu	1.00 Dokumen	219.185.000,00	Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	SK Kepala Daerah tentang SOP Tersedia Tepat Waktu	1.00 Dokumen	219.185.000,00	
			Inovasi Pelayanan Publik Terkirim Tepat Waktu ke Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	8.00 Aksi				Inovasi Pelayanan Publik Terkirim Tepat Waktu ke Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	8.00 Aksi		
9	Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100.00 %	3.507.892.220,76	Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100.00 %	3.507.892.220,76	
	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan	Bagian Kesra	Jumlah Kebijakan Bidang Agama Pendidikan dan Kebudayaan Yang Ditetapkan	1.00 Kebijakan	3.369.048.436,76	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan	Bagian Kesra	Jumlah Kebijakan Bidang Agama Pendidikan dan Kebudayaan Yang Ditetapkan	1.00 Kebijakan	3.369.048.436,76	
	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata	Bagian Kesra	Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata Yang Ditetapkan	1.00 Kebijakan	71.584.132,00	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata	Bagian Kesra	Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata Yang Ditetapkan	1.00 Kebijakan	71.584.132,00	
	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bagian Kesra	Jumlah Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Ditetapkan	2.00 Kebijakan	67.259.652,00	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bagian Kesra	Jumlah Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Ditetapkan	2.00 Kebijakan	67.259.652,00	
10	Program Pengembangan Program Pembangunan Daerah		Jumlah Paket Pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi Masyarakat	100.00 persen	898.060.317,00	Program Pengembangan Program Pembangunan Daerah		Jumlah Paket Pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi Masyarakat	100.00 persen	898.060.317,00	
	Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Bag. ADM Pembangunan	Cakupan Program Pembangunan Daerah	100.00 persen	262.113.947,00	Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Bag. ADM Pembangunan	Cakupan Program Pembangunan Daerah	100.00 persen	262.113.947,00	
	Pengendalian Program Pembangunan Daerah	Bag. ADM Pembangunan	Laporan Hasil Pengendalian	100.00 persen	315.490.250,00	Pengendalian Program Pembangunan Daerah	Bag. ADM Pembangunan	Laporan Hasil Pengendalian	100.00 persen	315.490.250,00	
	Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah	Bag. ADM Pembangunan	Laporan Hasil Evaluasi	100.00 persen	320.456.120,00	Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah	Bag. ADM Pembangunan	Laporan Hasil Evaluasi	100.00 persen	320.456.120,00	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 yang mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang diimplementasikan dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry, dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Salah satu program prioritas terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah prioritas Reformasi Birokrasi yang akan mulai digarap sebagai upaya dukungan terhadap pencapaian program nasional. Selain pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah Kab. Klungkung juga akan meningkatkan peran pada kebijakan-kebijakan terkait pelayanan publik. Tabel 3.1 menyajikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung.

Dalam upaya mendukung peran Kabupaten Klungkung dalam membangun Daerah yang selaras dengan arah prioritas pembangunan nasional, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mendukung melalui:

1. Prioritas Pangan dan Prioritas Perdagangan (Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan di Kabupaten Klungkung, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung turut mendukung melalui kebijakan stabilitasi harga bahan pangan, dimana Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung melakukan monitoring terhadap harga bahan pokok dan selanjutnya jika ditemukan harga bahan pangan diatas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan, dilakukan upaya berupa pelaksanaan pasar

murah di titik-titik yang berpotensi menjadi suatu titik rawan peningkatan harga bahan pangan pokok.

2. Prioritas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka mendukung program pemerintah dibidang pengembangan UMKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya Bagian Perekonomian membentuk Tim Monev KUR dan Tim Monitoring Penyertaan Modal Daerah. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi sejauhmana kebijakan pemerintah mampu berkinerja sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Prioritas Pengelolaan Pengawasan Perkotaan

Dalam rangka mendukung program nasional pengelolaan pengawasan perkotaan, Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan di Kabupaten/Kota yang disinergikan dalam pelaksanaan Inspeksi Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Klungkung Bersama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Hal ini merupakan suatu dukungan dalam bidang pengawasan perkotaan.

4. Prioritas Otonomi Daerah dan Desentralisasi

a. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka mendukung prioritas otonomi daerah dan desentralisasi, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mendukung melalui pembentukan produk hokum daerah yang responsive, akomodatif dan akuntabel. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus yang ingin dicapai oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kab. Klungkung adalah menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan serta meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan instansi pemerintah.

b. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah

Peningkatan efektivitas tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan suatu tantangan bagi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, dimana focus penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Operasional Prosedur, Sistem Kerja, Budaya Kerja dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah belum terselenggara secara maksimal. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus evaluasi organisasi perangkat daerah ini juga diarahkan untuk menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal instansi

pemerintah serta meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kedua hal tersebut juga merupakan suatu pengungkit dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- c. Penyusunan dan Evaluasi Mandiri Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kab. Klungkung. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Target Tahun 2020	Cara Perhitungan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	75	Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Evaluasi atas pelaksanaan SAKIP oleh Instansi Pemerintah

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sasaran strategis Sekretariat Daerah Kab. Klungkung telah ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Klungkung

TUJUAN	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2020	Program Pendukung
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra	90	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (Bag. Hukum dan HAM), Program Pengembangan Otonomi Daerah (Bag. Pemerintahan), Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bag. Pemerintahan), Program Pengembanagan Kebijakan Bidang

				Kesejahteraan Rakyat (Bag. Kesra)
	Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	90	Program Penyiapan data/Informasi Perkembangan Perekonomian daerah (Bag. Perekonomian) Program Peningkatan pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala daerah (Bag. Adm Pembangunan) Program penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bag. APBJ)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kab. Klungkung	Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	88	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah, Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Bagian Organisasi)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional	1	Program Peningkatan Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Bagian Organisasi) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Bag. Umum), Program Pelayanan Kesekretariatan Dan Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (Bag. Umum)

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka direncanakan program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kab. Klungkung adalah sebagaimana Lampiran 3.

LAMPIRAN 3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Kinerja	Rencana Tahun 2020			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4				URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				22.990.935.802,12		19.533.986.521,00	
4	1			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				22.990.935.802,12		19.533.986.521,00	
4	1	9		Program Pelayanan Kesekretariatan	indek reformasi birokrasi perangkat daerah		13.00 point	4.348.853.266,64	14.00 point	1.315.389.800,00	
4	1	9	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bagian Umum	100.00 persen	3.681.730.094,00	100.00 persen	478.834.000,00	
4	1	9	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Capaian Disiplin Aparatur	Bagian Umum	80.00 Persen	537.704.122,64	85.00 Persen	746.311.900,00	
4	1	9	3	Pengelolaan Kearsipan	Cakupan Surat-surat terdistribusi sesuai SOP	Bagian Umum	100.00 surat	21.094.500,00	100.00 surat	25.201.000,00	

4	1	9	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD tersedia tepat waktu	Bagian Umum	8.00 bulan	26.673.150,00	8.00 bulan	7.012.400,00
4	1	9	5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu	Bagian Umum	23.00 laporan	10.804.500,00	23.00 laporan	5.592.500,00
4	1	9	6	Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Laporan keuangan Terkirim Tepat Waktu	Bagian Umum	12.00 laporan	70.846.900,00	12.00 laporan	52.438.000,00
4	1	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpenuhi Tepat Waktu		100.00 persen	4.959.845.251,00	100.00 persen	4.443.113.692,00
4	1	16	9	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan layanan pimpinan daerah	Bagian Umum	100.00 persen	1.849.619.264,00	100.00 persen	1.766.510.000,00
4	1	16	12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Prosentase Rumah Jabatan Dalam Kondisi Baik	Bagian Umum	100.00 bulan	629.395.000,00	100.00 bulan	756.395.000,00
4	1	16	13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Prosentase Mobil Jabatan Dalam Kondisi Baik	Bagian Umum	100.00 12	701.037.024,00	100.00 12	666.139.600,00
4	1	16	14	Kegiatan Pelayanan dan Koordinasi Kedinasan Pejabat Daerah	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pejabat Daerah	Bagian Umum	100.00 Persen	1.779.793.963,00	100.00 Persen	1.254.069.092,00

4	1	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tingkat Kepuasan atas Layanan Kehumasan dan Keprotokolan		100.00 Persen	4.337.523.789,00	100.00 Persen	5.439.361.500,00
4	1	16	2	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Cakupan Layanan Keprotokolan Sesuai SOP	Bag. Humas	100.00 Persen	760.296.789,00	100.00 Persen	992.415.500,00
4	1	16	10	Dialog Interaktif	Cakupan Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Yang Didokumentasikan	Bag. Humas	100.00 persen	697.055.400,00	100.00 persen	1.029.159.400,00
4	1	16	11	Penyebarluasan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan Informasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Yang Disebarluaskan	Bag. Humas	100.00 Persen	2.880.171.600,00	100.00 Persen	3.417.786.600,00
4	1	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan		588.00 Peraturan	1.114.380.325,00	588.00 Peraturan	1.169.284.913,00
					Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang hukum dan HAM.		100.00 persen		100.00 persen	
4	1	26	1	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah kebijakan bidang hukum dan ham yang ditetapkan	Bag. Hukum	1.00 kebijakan	385.059.835,00	1.00 kebijakan	464.705.000,00
					Persentase capaian RAD HAM.		100.00 Persen		100.00 Persen	

					Cakupan Perkara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang difasilitasi		100.00 persen		100.00 persen	
4	1	26	3	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Rancangan produk hukum daerah tepat waktu	Bag. Hukum	588.00 produk hukum	475.625.690,00	588.00 produk hukum	396.057.500,00
4	1	26	5	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Desa Binaan Sadar hukum (Jml Desa 59, Desa sadar Hukum 10)	Bag. Hukum	8.00 Desa Binaan Sadar Hukum	253.694.800,00	8.00 Desa Binaan Sadar Hukum	308.522.413,00
					Rekomendasi terhadap Awig -awig Desa pakraman yang dikukuhkan Bupati (jumlah DP 112)		2.00 Desa Pakraman		2.00 Desa Pakraman	
					Cakupan Dokumen hukum yang dipublikasikan		100.00 Persen		100.00 Persen	
4	1	33		Program Pengembangan Otonomi Daerah	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Pemerintahan		100.00 100	950.466.086,72	100.00 100	1.013.440.000,00
4	1	33	4	Pembuatan Buku Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	LPPD dan ILPPD Terkirim Tepat Waktu	Bag. Pemerintahan	2.00 Laporan	77.840.000,00	2.00 Laporan	65.800.000,00

4	1	33	11	Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat	Jumlah Rekomendasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yang Ditindaklanjuti	Bag. Pemerintahan	4.00 Rekomendasi	63.145.000,00	4.00 Rekomendasi	59.260.000,00
4	1	33	14	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Ditindaklanjuti	Bag. Pemerintahan	4.00 Rekomendasi	546.605.000,00	4.00 Rekomendasi	569.950.000,00
4	1	33	15	Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kerjasama Daerah	Bag. Pemerintahan	100.00 persen	116.862.500,00	100.00 persen	131.550.000,00
4	1	33	17	Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan atau Desa	Jumlah Rekomendasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, Kelurahan dan/atau Desa yang Ditindaklanjuti	Bag. Pemerintahan	4.00 Rekomendasi	52.225.000,00	4.00 Rekomendasi	61.930.000,00
4	1	33	18	Fasilitasi Kebijakan Bidang Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Bidang Pemerintahan	Bag. Pemerintahan	6.00 Kebijakan	93.788.586,72	6.00 Kebijakan	124.950.000,00
4	1	47		Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah	Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang perekonomian		100.00 jumlah	895.135.982,00	100.00 jumlah	1.363.558.200,00
4	1	47	1	Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah kebijakan pengendalian inflasi daerah	Bag. Perekonomian	1.00 kebijakan	314.571.246,00	1.00 kebijakan	478.317.000,00
4	1	47	5	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UMKM	Jumlah kebijakan bidang UMKM yang ditetapkan	Bag. Perekonomian	1.00 kebijakan	110.873.204,00	1.00 kebijakan	49.550.000,00

4	1	47	6	Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD	Jumlah kebijakan terkait BUMD dan BLUD	Bag. Perekonomian	1.00 Kebijakan	86.158.000,00	1.00 Kebijakan	323.773.100,00
4	1	47	7	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya Alam	jumlah kebijakan bidang sumber daya alam	Bag. Perekonomian	2.00 kebijakan	242.796.732,00	2.00 kebijakan	188.145.000,00
4	1	47	8	Monitoring dan Evaluasi Bidang Perijinan, Investasi dan Penyertaan Modal	Jumlah kebijakan bidang perijinan, investasi dan penyertaan modal	Bag. Perekonomian	5.00 kebijakan	140.736.800,00	5.00 kebijakan	323.773.100,00
4	1	56		Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tingkat kepuasan pengguna atas pemilihan penyedia barang/jasa		3.25 indeks	620.857.500,00	3.30 indeks	784.441.792,00
4	1	56	1	Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Cakupan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang diselesaikan	Bag. Adm. PBJ	100.00 persen	410.593.500,00	100.00 persen	544.217.500,00
4	1	56	3	Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pengadaan Barang/Jasa	Cakupan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Yang mendapatkan sosialisasi kebijakan PBJ	Bag Adm PBJ	35.00 Persen	137.203.500,00	45.00 Persen	168.024.000,00
					Cakupan Sengketa Kontrak Yang Difasilitasi		100.00 persen		100.00 persen	
4	1	56	4	Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Cakupan Paket Pengadaan Yang Diselesaikan Secara Elektronik	Bag. Adm PBJ	3.00 Persen	73.060.500,00	8.00 Persen	72.200.292,00
4	1	58		Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Pencapaian Target-Target Tahapan Reformasi Birokrasi		82.00 Persen	1.357.921.064,00	85.00 Persen	834.833.124,00

4	1	58	1	Perencanaan~ Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan Reformasi Birokrasi Terkirim Tepat Waktu	Bagian Organisasi	1.00 Dokumen	899.984.264,00	1.00 Dokumen	496.648.124,00
					Dokumen SAKIP Kabupaten Klungkung Tersedia Tepat Waktu		1.00 Gabung		1.00 Gabung	
4	1	58	2	Peningkatan Efektifitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Perbup Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Tersedia Tepat Waktu	Bagian Organisasi	0.00 Dokumen	238.751.800,00	1.00 Dokumen	167.631.500,00
					Perbup Kelas Jabatan Tersedia Tepat Waktu		1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	
4	1	58	3	Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah	SK Kepala Daerah tentang SOP Tersedia Tepat Waktu	Bagian Organisasi	1.00 Dokumen	219.185.000,00	0.00 Dokumen	170.553.500,00
					Inovasi Pelayanan Publik Terkirim Tepat Waktu ke Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik		8.00 Aksi		8.00 Aksi	
4	1	63		Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat		100.00 %	3.507.892.220,76	100.00 %	3.170.563.500,00
4	1	63	1	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kebijakan Bidang Agama Pendidikan dan Kebudayaan Yang Ditetapkan	Bagian Kesra	1.00 Kebijakan	3.369.048.436,76	1.00 Kebijakan	3.104.999.500,00

4	1	63	2	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata	Jumlah Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, PP dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Pariwisata Yang Ditetapkan	Bagian Kesra	1.00 Kebijakan	71.584.132,00	1.00 Kebijakan	35.054.500,00
4	1	63	3	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Ditetapkan	Bagian Kesra	2.00 Kebijakan	67.259.652,00	2.00 Kebijakan	30.509.500,00
4	1	80		Program Pengembangan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pembangunan daerah yang sesuai dengan aspirasi Masyarakat		100.00 persen	898.060.317,00	100.00 persen	0
4	1	80	1	Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Cakupan Program Pembangunan Daerah	Bag. Pembangunan	ADM 100.00 persen	262.113.947,00	100.00 persen	0
4	1	80	2	Pengendalian Program Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Pengendalian	Bag. Pembangunan	ADM 100.00 persen	315.490.250,00	100.00 persen	0
4	1	80	3	Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah	Laporan Hasil Evaluasi	Bag. Pembangunan	ADM 100.00 persen	320.456.120,00	100.00 persen	0
TOTAL								22.990.935.802,12		19.533.986.521,00

BAB IV PENUTUP

Lebih dari sekedar memenuhi amanah Peraturan Perundang-Undangan, dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung memiliki dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2020. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis.

Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung, meskipun perlu disampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif, dimana dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan dimasa mendatang, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja dimasa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Pada Tahun 2020.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

